

Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya

Annisa Handayani (098694278)

Universitas Negeri Surabaya

Email :Icha_kaka22@yahoo.com

Abstract

The implementation of People's Business Credit risk, credit congestion is a problem affecting the health of banks. Therefore, we need an execution control system to assess internal controls and to know the policy of the bank's management in their performing duties. This research was conducted with the aim to evaluate the Internal control system BNI with existing theories. The research result shows that the system adopted in the micro credit lending process has already most of the elements of internal control, BNI has an adequate internal control structure of the credit for preventing abuse of authority.

Key word : *Internal control system, credit*

PENDAHULUAN

Salah satu sektor potensial yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha kecil dan menengah. Namun demikian, sektor ini pada umumnya menghadapi masalah dalam berbagai aspek permodalan, seperti masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. Bank sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk peransertanya melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan peran serta bank terhadap usaha kecil dan menengah dalam pemberian kredit, maka usaha kecil dan

menengah diharapkan dapat meningkatkan usahanya dengan kualitas yang lebih baik, sehingga usaha kecil dan menengah dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

Bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang diterimanya. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana sistem pengendalian internal pada BNI dalam menunjang efektivitas pemberian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah ? Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada BNI yang diterapkan dalam menunjang efektifitas pemberian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Menurut Al. Hryono Jusup (2001:252) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (1) Keandalan

laporan keuangan : Manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditor dan para pemakai lainnya baik secara hukum maupun profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (2) Efektivitas dan efisiensi operasi : Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu serta mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Bagian penting lain dari efektifitas dan efisiensi adalah penggunaan aktiva dan catatan fisik perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak apabila tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama juga berlaku untuk aktiva non fisik seperti piutang usaha, dokumen-dokumen. (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku : Dalam akuntansi tidak semua hukum dan undang-undang berhubungan dengan akuntansi, hukum dan peraturan yang tidak berhubungan dengan akuntansi yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan akuntansi yaitu peraturan tentang perpajakan.

Menurut Mulyadi (1998:171) sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Aplikasi Pengendalian Internal dalam Perbankan.

Beberapa bentuk aplikasi pengendalian internal dalam perbankan menurut Teguh Pudjo Mulyono (1999:25) dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Division of

Duties (Pemisahan Tugas) Yaitu saat pemisahan tugas antara fungsi-fungsi administratif, operasional dan penyimpanan khususnya dalam kegiatan perkreditan. (2) Dual Control (Pengendalian Ganda) Yaitu suatu bentuk prosedur kerja yang menciptakan adanya suatu pengecekan ulang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk menentukan : Apakah petugas pelaksana telah bertindak sesuai dengan batas wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukannya, apakah transaksi yang telah dicatat, dibukukan, diadministrasikan dengan benar dan apakah transaksi tersebut telah disesuaikan dengan prosedur yang benar. (3) Joint Custodody (Penjagaan Bersama) yaitu dalam kegiatan sehari-hari bank banyak mengelola berbagai barang dimana beberapa di antaranya harus disimpan oleh bank. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan, dibuat untuk suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang. Apabila memungkinkan para pemegang saham memiliki perbedaan kunci dalam perusahaannya dan apabila tempat penyimpanan akan dibuat maka setiap pemegang saham harus hadir. (4) Mandatory Vacation (Pemberian Hak Cuti) Yaitu bentuk mekanisme pengendalian dengan cara pemberian hak dan kewajiban karyawan untuk melaksanakan cuti dalam jangka waktu tertentu. Pemberian cuti dimaksudkan untuk memiliki kesegaran mental dan jasmani, serta dalam rangka memberi kesempatan pada penggantinya untuk menilai kesalahan dan mengadakan tindakan koreksi bila terdapat kesalahan yang tidak disadari yang telah dilakukan oleh pegawai yang melaksanakan cuti tersebut. (5) Number Control (Pengendalian dengan Penomoran) Yaitu bentuk mekanisme pengendalian melalui penomoran atas formulir dan kertas kerja yang dipakai

untuk melaksanakan kegiatan kerja serta pemberian kode nomor yang sistematis atas setiap transaksi yang dilakukan. (6) Outside Activities of Bank Personnel (Pembatasan Kegiatan Pegawai Bank) Misalnya : tiap personel bagian pekreditan idealnya tidak memiliki kegiatan usaha yang bersifat positive motive, khususnya yang berhubungan dengan debiturnya yang dapat memberikan keuntungan pribadi diluar usaha bank tersebut. (7) Rotation of Duty Assigment (Rotasi Kerja) Yaitu suatu bentuk mekanisme pengendalian melalui rotasi pegawai secara sistematis dengan tujuan : (1) Menghilangkan kejenuhan, (2) Menghilangkan sikap apatis, (3) Menimbulkan motivasi, (4) Memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi. (8) Independence Balancing (Pengendalian Melalui Persamaan) Yaitu suatu bentuk pengendalian melalui persamaan akuntansi. Apabila proses akuntansi dilakukan dengan benar, maka secara otomatis akan menghasilkan keseimbangan antara saldo debit atau kredit.

Pengendalian internal Kredit

Pada umumnya pengendalian internal kredit meliputi unsur-unsur pengendalian internal berupa penelaahan dan penekanan pada tujuan pengendalian yang ingin dicapai perusahaan. Menurut La Midjan (1994;355) memuat prinsip-prinsip berikut : (1) Perlu adanya pemisahan fungsi antara : Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit, fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau administrasi kredit dan fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit. (2) Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai posisi dana dengan kredit. (3) Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan. (4) Perlu pelaksanaan

inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut pengawasan administratif. (5) Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang akan menjamin keamanan atas kelayakan, baik bersifat prefentif maupun represif. (6) Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat. (7) Perlu disusun sistem pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas pemberian kredit berikut rekening-rekrning giro, kredit, dan lain-lain secara baik (filling system).

Kredit

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Menurut Eric L. Kohler (1964), Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Prinsip-prinsip pemberian kredit

Penilaian kredit oleh bank dilakukan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Adapun bentuk penilaian pemberian kredit secara umum dilakukan dengan analisis 5 C sebagai berikut : (1) Caracter : Merupakan sifat atau watak seseorang yang harus benar-benar dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur maka dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan sifat pribadinya seperti gaya hidup yang dianutnya. (2) Capacity :

Menunjukkan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam mengelola bidang usahanya. (3) Capital : Analisis capital dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan laba rugi) yang disajikan dengan pengukuran likuiditas, solvabilitas dan rentabilitasnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal diperoleh sekarang ini, berapa prosentase modal kerja yang digunakan untuk membiayai proyek yang dijalankan, berapa modal sendiri dan beberapa alokasi modal pinjaman. (4) Condition of Economic : Penilaian kondisi ekonomi sangat penting guna penelitian prediksi pembayaran kredit di masa yang akan datang. (5) Collaterral : Merupakan jaminan dari calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. Jaminan ini hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan serta harus diteliti keabsahannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang kedua yang berfungsi sebagai data pelengkap bagi sumber data primer.

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2004) Metode Deskriptif analisis yaitu adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa sekarang. Penelitian ini bersifat untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti dan menganalisisnya. Data yang diperoleh dari sumber data diatas selanjutnya penulis olah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu penyempurnaan data untuk di analisa dan diuraikan dalam bentuk deskriptif yang dilatarbelakangi oleh adanya konsep dan teori yang dikemukakan dalam rerangka pemikiran dan bagian tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran.

Tempat penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah VIII Surabaya. Berlokasi di Jl. Jend. A. Yani No.286 Gedung Graha Pangeran Lt.5.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Wawancara :Wawancara merupakan pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indrianto dan Supomo, 2002). Teknik wawancara ini dilakukan secara formal dan intensif sehingga akan mampu memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail. Wawancara dalam penelitian ditujukan kepada manajer dan bagian kredit untuk mengetahui sejarah perusahaan, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit serta sistem pengamanan dan pengawasan yang dilakukan. (2) Observasi :

Observasi atau pengamatan merupakan peninjauan secara langsung untuk mengetahui jalannya prosedur pemberian kredit pada perusahaan. (3) Dokumentasi : Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Modul yang berisi profil dan penjelasan singkat tentang PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (b) Struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Wilayah VI Surabaya. (c) Laporan tim bagian pengkreditan atas prosedur pemberian kredit serta sistem pengamanan dan pengawasan yang dilakukan.

Teknik Analisis Data

Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Meminta data ketepatan pemberian kredit serta pengendalian internal yang diterapkan pada bidang perkreditan (kredit usaha rakyat) BNI. (2) Melakukan interview dengan pihak bank untuk mengetahui sejarah perusahaan, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit serta sistem pengamanan dan pengawasan yang dilakukan. (3) Membandingkan data sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BNI dengan teori yang ada apakah telah sesuai atau belum. (4) Penarikan kesimpulan harus disesuaikan dengan keseluruhan hasil dari proses pengumpulan data. Kemudian seluruh temuan penelitian dideskripsikan dan disimpulkan sehingga diperoleh penjelasan tentang hasil sistem pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah.

PEMBAHASAN

Profil BNI

Bank Negara Indonesia (BNI) berdiri sejak 5 Juli 1946, dan merupakan bank pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalanan

sejarah sejak berdirinya, nama resmi BNI dari masa ke masa mengalami perubahan. Seperti halnya perbankan lainnya, BNI juga mengalami masa pasang surut yang disebabkan karena adanya perubahan iklim ekonomi makro.

Dalam Bank Negara Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut :

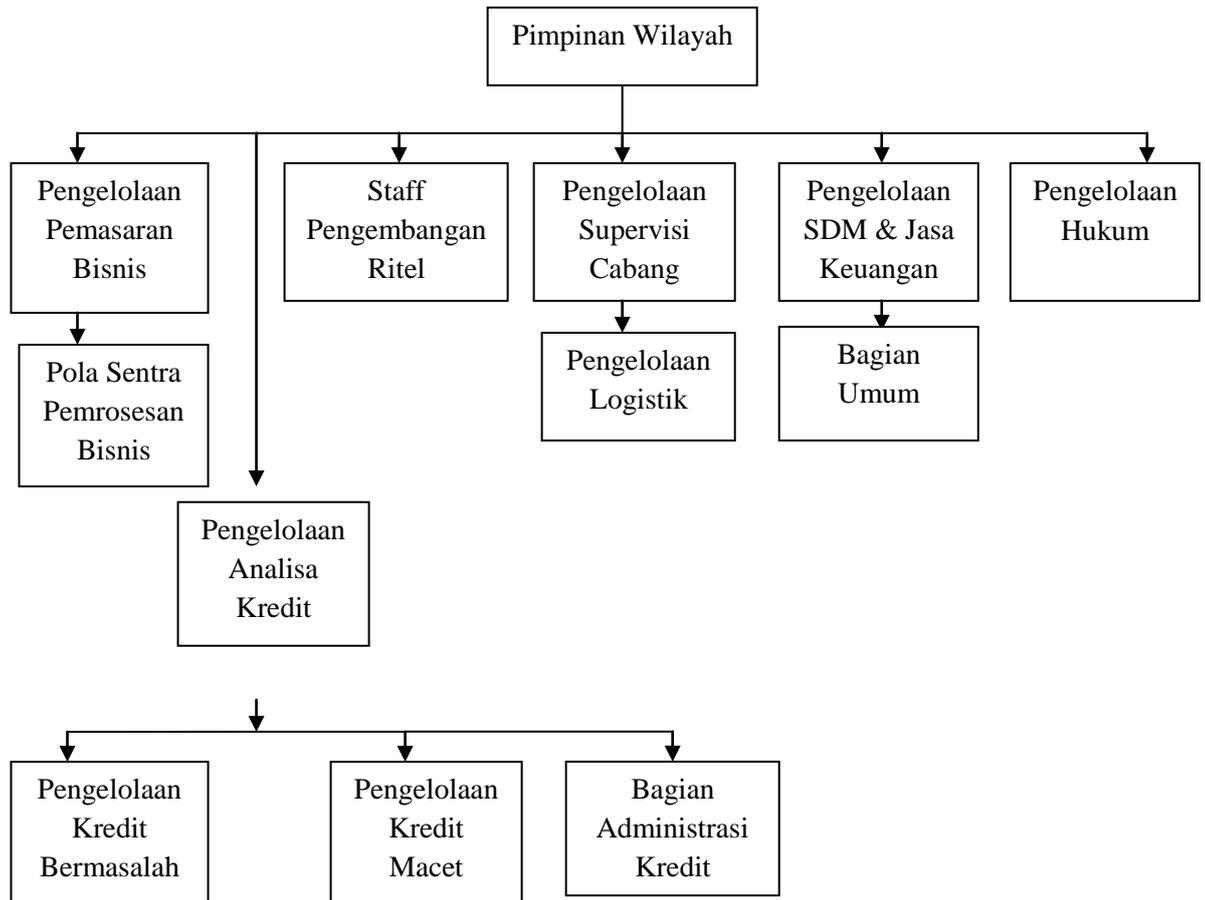
Visi BNI : Menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja

Misi BNI : Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (the bank choice), meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial dan menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Values : kenyamanan dan kepuasan pelanggan

Struktur Organisasi Bank BNI

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNI

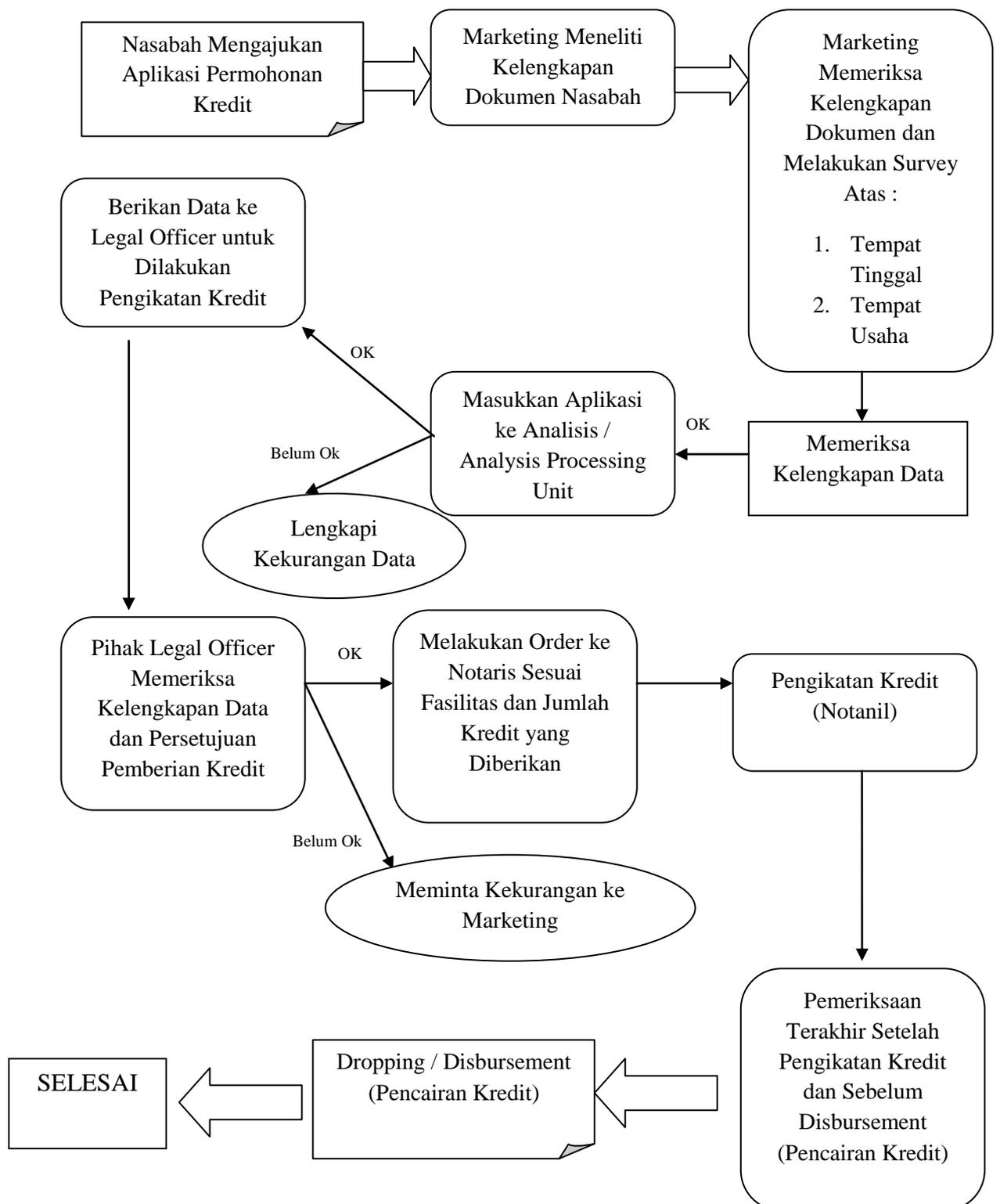


Program BNI - Kredit Usaha Rakyat

BNI-Kredit Usaha Rakyat (BNI-KUR) Produk modal usaha dari BNI ini dinamakan dengan BNI-Kredit Usaha Rakyat (BNI-KUR). Fasilitas kredit BNI-KUR dapat bernilai sampai dengan Rp.500 juta yang diberikan untuk usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jangka waktu kredit maksimal sampai dengan 5 tahun. Keunggulan dari produk kredit modal usaha ini adalah proses yang lebih cepat dengan persyaratan mudah.

Analisis Sistem Pemberian kredit PT. Bank Negara Indonesia BNI
 menetapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha rakyat tersebut. Berikut proses pemberian kredit di BNI :

Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Negara Indonesia, Tbk



Sumber : PT. Bank Negara Indonesia, Tbk

Penjelasan gambar 4.2 yaitu : (1) Persiapan kredit : Calon debitur mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh kredit usaha rakyat kepada BNI dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Atas dasar permohonan tersebut, BNI mencari informasi tentang calon debitur, baik dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat usaha pemohon maupun melalui sarana on line, yaitu Sistem Informasi Debitur (SID) untuk memeriksa kebenaran atas data yang disampaikan dan untuk menentukan kolektibilitas pinjamannya. (2) Analisa kredit : Analisa atas permohonan kredit usaha rakyat calon debitur, dilakukan oleh BNI agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat guna dan sasaran, serta aman bagi BNI. (3) Penyampaian aplikasi kredit kepada pemutus kredit : Dalam tahap ini telah didapat kesimpulan pokok dari analisa kredit yang merupakan suatu pendapat dan saran yang disampaikan kepada pemutus kredit di BNI (pemimpin cabang, pemimpin wilayah atau direksi, tergantung dari kredit yang diajukannya dan maksimumnya). (4) Pengambilan keputusan kredit : Disetujui atau ditolaknya permohonan atas kredit diputuskan oleh BNI atas dasar hasil aplikasi yang disampaikan dengan didukung oleh analisa atas data yang ada di BNI. (5) Perjanjian kredit : Setelah permohonan kredit disetujui, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kredit dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, baik secara resmi dihadapan notaris yang ditunjuk BNI maupun dilakukan di bawah tangan (antara BNI dengan debitur, diikat dengan perjanjian tersendiri). Debitur

diharuskan untuk melunasi bea materai dan propisi kredit. Besarnya propisi kredit modal kerja tersebut berkisar 1% dari pokok kredit modal kerja yang disetujui. Pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Debet	Cash/rekening nasabah	Rp xxx.xxx
Kredit	Pendapatan propisi kredit yang diterima dimuka	Rp xxx.xxx

(6) Disposisi/pencairan kredit : Pada tahap ini kredit usaha rakyat yang telah disetujui dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit beserta agunannya, dikreditkan langsung ke rekening debitur yang ada di BNI (debitur wajib membuka rekening giro atau tabungan di BNI). Selain itu debitur dapat langsung menggunakan dana tersebut untuk menunjang kegiatan perusahaannya. Pembukuan yang dilakukan sebagai berikut :

Debet	Kredit yang diberikan	Rp xxx.xxx
Kredit	Rekening nasabah	Rp xxx.xxx

PT Bank Negara Indonesia Tbk Kanwil Surabaya memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain, diperlukan suatu pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem

pemberian kredit. Oleh karena itu permohonan kredit akan disetujui oleh BNI, apabila memenuhi kriteria berikut ini : (1) BNI yakin bahwa modal kerja yang diberikannya benar-benar aman dan tidak akan berpotensi untuk terjadinya kredit macet dikemudian hari. (2) kredit yang diberikan dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat bermanfaat bagi penerima kredit untuk mengembangkan usahanya. (3) BNI hanya akan memberikan kredit sebesar yang dibutuhkan.

Menurut analisa penulis prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia telah sesuai dengan teori yang ada, karena dengan adanya prosedur pemberian kredit maka akan memperkecil tingkat resiko adanya kegagalan kredit (kredit macet). Pada dasarnya kredit yang diberikan merupakan kepercayaan, maka dari itu setiap kredit usaha rakyat yang diberikan tersebut mengandung suatu risiko. Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu sistem pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas pemberian kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna.

Analisis sistem pengendalian internal di PT. Bank Negara Indonesia

Berikut pembahasan atas setiap unsur struktur pengendalian internal pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Adalah sebagai berikut: (1) Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah atmosfir dimana manajemen dan karyawan melaksanakan kegiatannya dan menunaikan tanggung jawabnya untuk mengendalikan organisasi. Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan dimana terdapat orang-orang yang kompeten yang memahami

tanggung jawabnya dan batasan atas wewenang, mengetahui, menghayati dan memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen untuk mengikuti kebijakan, prosedur, dan standar etika organisasi. Pembagian tugas dan wewenang dibidang perkreditan kredit pada bank ini sudah baik. Sebelumnya semua staf dan pejabat kredit diberikan bekal pengetahuan khusus dan ditraining lebih dahulu agar bisa secara jelas memahami bidang perkreditan. Pembagian tugas tersebut adalah baik untuk menyakinkan bahwa masing-masing staf atau bagian mengetahui dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat terjalinnya kerjasama yang baik antar bagian-bagian di dalam kegiatan operasional demi tercapainya tujuan perusahaan. Bank juga melakukan mutasi kerja karyawan pada bagian perkreditan ini sudah baik, hal ini dilakukan dengan memiliki berbagai tujuan untuk menghilangkan kejenuhan pada satu bidang saja, adanya sifat apatis, menimbulkan self-motivation, dan untuk mengembangkan keterampilan pada jenis-jenis tugas dibidang yang lain. Dokumen-dokumen yang terkait dalam pemberian kredit dari berkas permohonan kredit sampai dengan berkas penutupan kredit diarsipkan secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik dan disimpan diletakkan di dalam brankas tahan api dan di ruang khusus. Dalam proses pengarsipan ini bank sudah baik, hal ini dilakukan karena dokumen tersebut merupakan bahan bukti audit yang akan diperlukan dalam proses audit dan untuk menjaga kerapihan penyimpanan dokumen jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai salah satu acuan bank pada debitur yang akan meminjam lagi, penggunaan komputer dalam hal transaksi kredit menunjang kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang

memiliki keuntungan seperti menghemat waktu dan tempat penyimpanan data debitur dan menjaga keamanan penyimpanan pembukuan karena tiap-tiap debitur mempunyai kode-kode pribadi sendiri yang tidak diketahui oleh pihak lain dan disimpan di brankas tahan api supaya bila sewaktu-waktu terjadi hal yang terburuk. (2) Penaksiran Resiko. Penaksiran resiko mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang timbul dari perubahan keadaan dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan kredit yang diberikan pada nasabah serta pengaruh terhadap bank yang bersangkutan. Penaksiran resiko pada Bank Negara Indonesia yang berhubungan dengan kredit adalah adanya kredit bermasalah atau kredit macet dimana kemungkinan sebagian nasabah yang tidak dapat melunasi kreditnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti nasabah yang meninggal dunia, nasabah yang pindah alamat tanpa adanya pemberitahuan atau diketahui oleh pihak bank, bangkrutnya usahanya dari suatu debitur. Selain itu adanya resiko dimana terjadinya perubahan keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi kelancaran kredit yang diberikan oleh bank. Untuk mengantisipasi/menghindari adanya kredit bermasalah dimasa mendatang, maka Bank Negara Indonesia mengambil langkah-langkah yang ditujukan kepada debitur, sebagai berikut: (a) Melihat debitur yang usahanya yang bagus dan karakteristiknya bagus atau melihat 5 C's secara periodik. (b) Bank melakukan penagihan yang secara terus menerus. (c) Eksekusi agunan debitur secara selektif. Dalam langkah-langkah yang dilakukan bank untuk mengantisipasi/menghindari adanya kredit macet atau bermasalah sudah baik karena bank untuk menyetujui permohonan calon debitur dilakukan secara selektif, setelah menjadi debitur pemberian kredit, bank

melakukan penilaian atau penyelidikan kepada debiturnya dalam hal character, capacity, capital, collection, dan condition of economic (5C's) dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan/peningkatan atau penurunan usaha debitur, jika bank ternyata menemukan adanya debitur yang usahanya akan menunjukkan penurunan maka bank melakukan penagihan secara terus menerus agar tidak terjadi kredit macet dan jika debitur tersebut ternyata memang sudah bangkrut atau tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman dan bunga pinjaman maka bank menyelesaikannya dengan cara mengeksekusi atau menyita agunan kredit dan mengambilalih agunan debitur untuk di lelang atau dijual agar bank mendapatkan uang kas untuk proses kegiatan operasional perkreditan demi tercapainya tujuan perusahaan. (3) Informasi dan Komunikasi. Informasi mencakup sistem akuntansi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu usaha, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang usahanya tersebut. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi yang telah dilaksanakan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi ini dimulai dari pencatatan kredit pada waktu pemberian kredit, penyetoran-penyetoran, dan pembayaran bunga sampai pada pelunasan kredit. Adanya usaha kecil dan menengah, oleh sebab itu bank menetapkan batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan kemampuan dan persyaratan, berikut juga dengan tingkat suku bunganya sesuai dengan segmen kredit. Bank menetapkan plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit sudah baik karena hal ini dilakukan untuk

menghindari ketidaksanggupan debitur untuk membayar pinjaman beserta bunganya, sebelumnya plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan debitur) sebelum penyaluran kredit diberikan. Plafond kredit ini ditetapkan secara objektif atas hasil analisis asas 5C's (character, capacity, capital, collection, dan condition of economic) oleh analis kredit (mantri). (4) Aktivitas Pengendalian. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan bank. Adapun kebijakan maupun prosedur aktivitas pengendalian ini dalam Bank Rakyat Indonesia mencakup: (a) Adanya pemisahan fungsi yang memadai/jelas dalam prosedur pemberian kredit. (b) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. Agar aktivitas pengendalian ini berjalan dengan baik maka pihak Bank Negara Indonesia juga telah membuat struktur organisasi terutama dalam bidang perkreditannya, dapat dilihat bahwa terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tepat bagi setiap karyawan dalam perusahaan, sehingga masing-masing bagian mengetahui dengan jelas apa tugas mereka dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Hal ini adalah baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Guna menjaga keakuratan informasi yang diperlukan, maka laporan-laporan dari calon debitur dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berkompoten dan independen. Pengendalian dan pengevaluasian jaminan calon debitur dilakukan sendiri oleh analis kredit (mantri) dalam penilaian jaminan. Keabsahan jaminan tersebut telah dipastikan menurut hukum, besarnya kredit

yang diberikan bukan berdasarkan jaminan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan nilai jaminan yang dimiliki. Dokumen-dokumen yang terkait dalam pemberian kredit dari berkas permohonan kredit sampai dengan berkas penutupan kredit diarsipkan secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik dan disimpan diletakkan di dalam brankas tahan api dan diruang khusus. Hal ini dilakukan karena dokumen tersebut merupakan bahan bukti audit yang diperlukan dalam proses audit. Dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur pemberian kredit dibuat back-upnya dan hanya tidak disimpan di kantor operasional saja. Jika terjadi perubahan data mengenai debitur, maka akan selalu di update melalui pemantauan dan pemeriksaan kembali, karena dokumen ini digunakan sebagai bahan monitoring.

(5) Pemantauan/pengawasan. Pemantauan adalah proses penilaian struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan struktur pengendalian intern, khususnya dibidang perkreditan pada Bank Negara Indonesia dilaksanakan oleh bagian analis kredit, analis kredit melakukan pemantauan yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan maksimalnya 12 kali dalam setahun. Dalam pemantauan ini pihak bank sebelum melakukan pemantauan memberitahukan informasi kepada pihak calon debitur. Fokus utama pemantauan yang dilakukan oleh analis kredit adalah pada aktivitas sehari-hari yang terjadi dalam usahanya. Disamping itu juga ada empat unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian menjadi faktor yang sangat penting dalam pemberian kredit karena pada elemen SPI (Sistem Pengendalian Internal) tersebut merupakan prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian kredit kepada debitur.

Dalam hal ini terdapat kelemahan dimana sebaiknya analisis kredit sebelum melakukan pemantauan tidak perlu memberitahukan kepada calon debitur karena bisa saja calon debitur menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh analisis kredit (mantri) dengan informasi yang palsu atau tidak benar keadaannya.

Menurut analisis penulis, Sistem Pengendalian internal pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kanwil Surabaya terhadap pemberian kredit telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan teori yang ada. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas sistem pemberian kredit perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan. Untuk itu, bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria-kriteria tertentu guna mencapai tujuan pemberian kredit. Kriteria-kriteria seperti 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition of economic tetap relevan. Apabila prinsip tersebut terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai.

Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh bank tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang baik, bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi resiko kegagalan kredit. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian internal. BNI memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. BNI juga menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha rakyat tersebut. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kanwil Surabaya telah sesuai dengan teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif. Sesuai dengan proposisi yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti yaitu "Sistem pengendalian internal yang baik memadai dapat mendukung tercapainya pemberian kredit yang efektif".

Saran

Adapun saran-saran yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan antara lain pemeriksaan dan pemantauan kredit seharusnya dilakukan sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui sejak dini. Selain itu, bank hendaknya membuat laporan tentang perkembangan usaha nasabah, untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan menjadikan usaha nasabah menjadi

lebih berkembang dan untuk mengetahui secara pasti kesesuaian antara penggunaan dana kredit oleh nasabah dengan tujuan yang tercantum dalam syarat permohonan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Hall, James, A. 2009. *Accounting Information System*. Terjemahan. Jakarta : Salemba Empat.

Jusup, Al, Haryono. 2001. *Auditing*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

Weygandt, Jerry, J., Donald E. Kieso, and Paul D. Kimmel. 2005. *Accounting Principles*. Jakarta : Salemba Empat.

Elder, Randal, J., Mark S. Beasley., Alvin A. Arens, and Amir Abadi Jusuf. 2011. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta : Salemba Empat.

Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Hariato, Eddy 2008, *Teknologi Informasi*, viewed 5 October 2011, <
http://www.balinter.net/news_67_Pengertian_Teknologi_Informasi_dan_komunikasi.html >

Amanina, Ruzanna 2011, *Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro*, viewed 06 Juli 2012, <
[http://eprints.undip.ac.id/26647/1/SKRIPSI_Ruzanna_Amanina_C2C607134_\(r\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/26647/1/SKRIPSI_Ruzanna_Amanina_C2C607134_(r).pdf) >

Elok,Izza,Africaniswara 2010, *Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit Investasi Pada Pt. Bank X*, viewed 10 Juli 2012, < http://ebook.library.perbanas.ac.id/5223_SKRIPSI.pdf >